



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 206 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
100.3.3.2/157/KUM/2026 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jumlah usulan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/157/KUM/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan perkada ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Lembaga Komisi atau Instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan perencanaan penyusunan perkada yang telah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/157/KUM/2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 April 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Seluruh Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Seluruh Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Bagian di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 206 /KUM/2026
TANGGAL 22 April 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
1.	PUPR	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Tanta;2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Muara Uya;3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Jaro;4. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Bintang Ara;5. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Haruai;6. Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;7. Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang;	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042
2.	BPKAD	<ol style="list-style-type: none">1. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Pergeseran); 3. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 4. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; 5. Standar Harga Satuan; 6. Analisis Standar Biaya; 7. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Tahun Anggaran 2026; 9. Pembayaran yang Melewati Tahun Anggaran; 10. Pembayaran Konsolidasi; 	<p>Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri</p>

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			<p>Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026</p>
3.	BAPENDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Sewa Reklame; 2. Nilai Perolehan Air Tanah; 3. Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 4. Tingkat Capaian Kinerja untuk Mendapatkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong; 5. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet 	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
4.	DISHUB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Tahun 2025-2045; 2. Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045; 	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan</p>

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
5.	DISNAKER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 2. Wajib Laport Lowongan Pekerjaan; 	<p>Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</p>
6.	SETDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah; 2. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak; 3. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong; 4. Peta Proses Bisnis Daerah; 5. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah; 7. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa</p>

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<p>8. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Insepktorat Daerah;</p> <p>9. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>10. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan;</p> <p>11. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>12. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;</p> <p>13. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>14. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>15. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>16. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;</p> <p>17. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik kepentingan</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p>

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<p>18. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>19. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>20. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan;</p> <p>21. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>22. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>23. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>24. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;</p> <p>25. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>26. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;</p> <p>27. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p>	

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<p>28. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>29. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>30. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>31. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>32. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>33. Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>34. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;</p> <p>35. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>36. Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan;</p> <p>37. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah;</p> <p>38. Analisis Standar Belanja Kabupaten Tabalong;</p>	

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
7.	DISPERSIP	Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
8.	INSPEKTORAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Keinvestigasian;2. Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan;3. Pengedalian Kecurangan;4. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;5. Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			<p>Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</p>
9.	DISKOMINFO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengelola Pelayan Informasi dan Dokumentasi; 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong; 3. Pedoman Manajemen Risiko Keamanan Informasi; 4. Tata Kelola <i>Command Center</i> Pemerintah Kabupaten Tabalong; 	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>

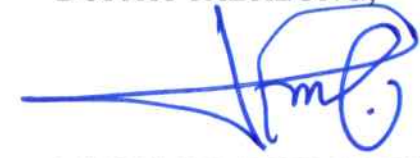
No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			<p>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
10.	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjalanan Dinas khususnya pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran; 2. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 3. Insentif Petugas Satlinmas Desa; 	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraa Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</p>
11.	DINSOSP3AP2KB	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2018 tentang Belanja Pembelian Beras Gratis untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong;	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang</p>

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KADIS/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI